



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAHMAD MAS'UD
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 208519

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.591.816.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 340.744.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 201.072.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1266 m2/646 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
4. Tanah Seluas 1130 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 2.600.000.000

1. MOBIL, BMW JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. MOBIL, JEEP WRANGLER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 941.080.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.534.707.066



F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.000.000
Sub Total	Rp.	11.682.603.066
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.682.603.066

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.